

Anwar Abugaza

Social Media Politica

Gerak Massa Tanpa Lembaga



Social Media Politica

Gerak Massa Tanpa Lembaga

Social Media Politica

Gerak Massa Tanpa Lembaga



Diterbitkan Atas Kerjasama



Social Media Politica

Hak cipta © 2013 pada Anwar Abugaza

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13 No. 22, Daya-Makassar 90245

e-mail: anwarabugaza@gmail.com

Setting : Amiruddin
Desain Cover : Surianto Rasyid
Korektor : Anwar Abugaza

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau sistem penyimpangan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis

Kata pengantar

Gelombang digital pertama di Indonesia dimulai sekitar tahun 1990, dengan lahirnya situs digital seperti astaga.com, detik.com, Kaskus.com, lipposhop.com, Satunet.com dan beberapa situs digital era pertama lainnya, keberadaan situs digital ini sangat besar pengaruhnya terhadap gerakan awal internet di Indonesia, keadaan ini turut memberi pengaruh terhadap social media untuk bisa diterima dengan baik dalam masyarakat beberapa tahun kemudian.

Social media sendiri mulai terdengar di Indonesia sejak kemunculan franstar tahun 2002, dan mulai ramai menjadi gerakan dan menyatu dengan keseharian masyarakat sejak kehadiran facebook tahun 2006 dan disempurnakan dengan twitter tahun 2006. facebook dan twitter sangat lekat dengan pengguna di indonesia, kemunculan socail media yang baru sampai 2013 belum mampu mengeser dominasi facebook dan twitter di indonesia.

Penulis
Anwar Abugaza

Daftar Isi

I

PENGANTAR & SEJARAH SOSIAL MEDIA

Hal.
01

- politik abab 21 - history of Social Media -
- sosial media dari tahun ke tahun - Social Media di Indonesia -

Hal.
22

JEJAK - FAKTA

Sosial Media & Politik

II

- US Election in Social Media -
- Gerak Massa tanpa Lembaga revolusi Timur Tengah -
- Sosial Media dan Pilkada Jawa Barat - #SaveKPK Gerak menuju
People Power - Sosial Media, Pilar Kelima Demokrasi -

III

Politik & Sosial Media

INTEGRASI

Hal.
88

- Integrasi Politik & Sosial Media - Social Media Monitoring -
- Profil lembaga Social Media Monitoring - Lembaga survey VS
Social Media Monitoring - Media Nyata vs media sosial -
- Menuju Industri Politik Sosial Media -

Hal.
150

MENUJU KEMENANGAN

Politik Sosial Media

IV

- Menanti Pertarungan Besar #2014 -
- Tokoh Politik Indonesia di Sosial Media -
- Menuju Kemenagan Politik Sosial Media -



BAB I

PENGANTAR & SEJARAH

Sosial Media

Politik
Indonesia
Abad 21



Sosial Media
dari Tahun
ke Tahun



History
of Social
Media

Sosial Media
di Indonesia





POLITIK INDONESIA Abad 21

“Mengurai **problematika** politik Indonesia **abad 21** dengan identitas dan **permasalahannya**, membawa kita pada **kesimpulan** politik telah gagal membawa **perbaikan**. Oleh kehendak zaman, **politik** harus **bertransformasi** membuka diri pada ruang dan **waktu** yang baru, politik **berbasis** kekuatan **electoral- web** menjadi solusi”

(anwar abugaza #socialmediapolitica)



Politik Indonesia Abad 21

Rancang bangun politik Indonesia sejak negeri ini digagas oleh para founding father bangsa, belum menemukan ruang makna yang baku. Etape-etape politik Indonesia diwarnai berbagai taste politik menurut selera elit pemegang kendali kekuasaan. Politik yang juga berarti kekuasaan, dipersepsi tak lebih dari sebuah prestise kuasa sebagaimana teori kebutuhan yang lahir dari rumusan Abraham Maslow. Tingkatan tertinggi dari tujuan hidup manusia, menurut Needs Theory adalah aktualisasi diri.

Oleh sebagian besar pelakunya, politik dianggap sekadar sebagai satu medan aktualisasi sehingga ia kerap hadir tanpa substansi. Sepintas, hal ini dapat kita baca dari laku para politisi yang mengkristal menjadi opini publik. Politik itu kotor. Demikian sering kita dengarkan masyarakat yang terserang pandemi apatisme terhadap politik. Simpulan tersebut tak bisa kita salahkan, sebab mereka hanya mendefinisikan dari apa yang mereka tangkap dari berbagai informasi yang beredar bebas di masyarakat.

Seperti apatisme masyarakat, demikian pula kita sebagai pelaku di dunia politik praktis, wajar jika muncul

sebuah keresahan terkait stigma negatif tersebut. Bahwa stigma tersebut tak sepenuhnya benar, juga tak sepenuhnya salah. Masih ada politisi langka yang tulus bekerja untuk rakyat, tidak selalu politik itu kotor. Ini kenyataan.

Namun juga memang tak bisa kita mungkiri ada ekspektasi masyarakat yang belum mampu dijawab soal idealitas politik kita. Maka menjadi penting melakukan pendekatan purifikasi makna politik dengan sentuhan universal yang menyatukan cakrawala kerakyatan dan elit pada satu titik keseimbangan untuk kemudian melahirkan redefinisi tentang negara dan politik dalam konteks dan kontenberdimensi ruang dan waktu yang diametral.

Politik menurut bahasa Yunani berasal dari kata Politeia atau Politicos yang berakar dari kata "polis". Kurang lebih dapat diterjemahkan dengan kata "kota", atau lebih tepatnya "negara-kota". Untuk mencerminkan makna ini, banyak bahasa menerjemahkan Politeia sebagai Negara (bahasa Inggris: The State), termasuk bahasa Belanda (De staat) dan bahasa Jerman (Der Staat).

Plato, filsuf Yunani yang banyak mengilhami praktik politik modern, 5 abad sebelum masehi, telah membuat sebuah rumusan tentang keadilan (justice) dalam negara idea (idea state), yaitu Negara yang menjunjung tinggi keadilan dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Salah satu ciri negara ideal menurut Plato adalah melayani kebutuhan dasar manusia dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan. Jadi, pada kenyataannya, terjemahan yang lebih tepat mestinya adalah bagaimana cara kita hidup

sebagai masyarakat.

Memotret pandangan Plato tentang Negara ideal, kemajuan sebuah negara tergantung pada pembagian kerja (division of labour) yang timbul secara alamiah di dalam masyarakat. Setiap orang memiliki kecenderungan dan karakter yang berbeda dan dengan sendirinya pekerjaan yang diminati pun berbeda. Sebab perkembangan politik di awal kemunculannya secara akademis, tak bisa dipisahkan dengan ilmu ekonomi yang banyak membahas kebutuhan eksistensial manusia.

Salah satu ciri negara ideal menurut Plato, adalah yang melayani kebutuhan dasar manusia dalam rangka membangun kualitas kemanusiaan. Plato mengklasifikasi pekerjaan menjadi tiga bidang; sebagai pengatur atau penguasa, tentara atau penjaga keamanan dan para pekerja. Bagi Plato, semua manusia bersaudara. Tetapi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa, sehingga ada orang yang cocok sebagai pengatur di dalam hal ini termasuk filusuf dan pemerintah atau abdi negara. Ada juga yang cocok sebagai tentara serta sebagian sebagai pekerja, dalam hal ini termasuk petani dan pedagang.

Dari jenis pekerjaan tersebut, hanya golongan terendah yaitu kaum pekerja yang boleh bekerja mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sedang penguasa dan tentara seyogyanya tidak bekerja demi harta. Dengan sendirinya menurut Plato, tidak diperkenankan mengumpulkan harta benda. Karena dengan cara seperti itu, mereka dapat betul-betul bekerja mengabdikan diri pada

negara sehingga pantas disebut abdi Negara.

Sedangkan menurut teolog Kristiani Thomas Aquinas, Negara merupakan lembaga sosial manusia yang paling tinggi dan luas. Negara berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. Oleh karena itu, setiap pegawai Negara harus mampu berperan sebagaimana cita-cita Negara, yaitu melayani terpenuhinya kebutuhan warga.

Pembagian dan pengaturan ini dianggap perlu karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas. Bahkan cenderung tamak, ingin memiliki diluar kebutuhannya, sehingga jika mengabaikan pengaturan, menjadi rintangan dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Demikian pula jika pengabdian dan pelayanan, termasuk di dalamnya pemimpin negara, dipandang sebagai pekerjaan, maka akan menimbulkan kekacauan dalam bernegara. Para pegawai negara tersebut berlomba-lomba mengumpulkan materi sehingga cara apapun dilakukan. Dan hal ini menjadi pintu bagi praktik koruptif yang bakal menggerogoti negara. Ini merupakan sebuah definisi dan pemikiran berdimensi moral kuat.

Pada awalnya, negara adalah ruang hampa tanpa makna yang kemudian hadir sebagai bagian dari proses reproduksi sosial. Negara yang terdiri dari tanah, udara, rakyat, sistem dan pemerintah menjadi kata substantif

ketika terikat dalam sebuah hukum. Adalah politik dalam hal ini yang mengisi ruang kosong tadi, menjadi unsur primer dalam kehidupan bernegara, sehingga definisi tentang Negara dan politik, lahir dari ruang dan waktu yang sama.

Melacak akar praktik politik dari filsafat moral Yunani Kuno, sejarah kelahiran ilmu politik merupakan satu kesatuan dengan sejarah lahirnya ilmu ekonomi. Tak heran jika kemudian kedua domain yang pada abad 20 kembali dipisahkan, kini justru kembali intim.

Ekonomi dan politik menjadi dua sisi mata uang yang padu dan saling melengkapi satu sama lain. Bedanya, Plato memadu politik dan ekonomi untuk menegaskan kewajiban negara dan aparatusnya dalam melayani rakyat, merealisasi kesejahteraan dan menjawab harapan-harapan. Sementara di kekinian, rakyat menjadi korban perkawinan dan kompromi politik ekonomi. Karena keduanya bukan absolut bergerak atas visi melayani, akan tetapi melanggengkan dominasi.

Kerancuan penyebab timbulnya praktik politik yang meyimpang dari harapan rakyat, terjadi karena berbagai faktor. Seperti terjadi misunderstanding tentang pengertian politik. Misalnya mereduksi makna politik pada sekadar cara mencapai tujuan, cukup sampai disitu. Di kelas-kelas ilmu politik universitas, politik mungkin masih dipandang secara filosofis sesuai fatsun akademik. Akan tetapi, pada tataran implementasi oleh para politisi, politik mengalami deviasi makna yang terlampau jauh oleh tafsir-tafsir subjektif sesuai kepentingan masing-masing.

Politisi kerap dipersepsi sebagai pekerjaan yang pada akhirnya mendorong publik untuk berlomba menjadi politisi dengan berbagai cara demi meraih tampuk kekuasaan. Imajinasi bahwa politik menjanjikan kehidupan ekonomi membentuk paradigma dan menelikung mental secara destruktif sebagai jobseeker dan worker atau pencari kerja. Ada yang kemudian menggantungkan angan di dunia politik mereka berharap akan bekerja, memenuhi tuntutan kebutuhan material.

Politik telah mengalami reduksi makna oleh politisi yang menampilkan wajah politik dengan uang dan kekuasaan, perjalanan waktu menjadi salah satu penyebab reduksi makna itu terjadi, rentang waktu sejak lahirnya rumusan politik telah mencapai ratusan tahun, dalam masa waktu itu, tidak ada upaya untuk menyegarkan perilaku politik yang menyimpang.

Akrobatik tentang politik dan kekuasaan menjadi menu utama dalam percaturan politik abad 21, Indonesia yang menjadi negara penganut paham demokrasi cenderung mengerus makna demokrasi dan politik, banyak peristiwa demoralisasi dan penyimpangan makna politik ditampilkan dalam panggung politik Indonesia, sebut saja penyakit kronis Korupsi yang telah mengurita mulai dari penyabat abangan sampai penyabat negara, transaksional dalam menyaahi kesaaan melalu manay politik, rekayasa data pemilih sampai sogok menyogok dalam penentuan pemimpin,

Negara Indonesia harus masuk dalam fase “Instal ulang” dalam perilaku dan penerapan politik,..
Perlu gagasan dan ruang baru dalam politik,.
Generasi dan kemandirian teknologi harus bersinergi.....menciptakan ruang dan sarana baru dalam berpolitik...











